

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan inovasi pemerintah merupakan salah satu langkah agar terwujudnya *good governance*. Berdasarkan Global Innovation Index (GII) 2019, Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 129 negara dengan skor 29,8. Pada regional ASEAN, inovasi Indonesia berada di posisi kedua terendah. Negara di ASEAN yang berhasil masuk peringkat 10 besar dunia hanya Negara Singapura dengan skor 58,4. GII digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai tolak ukur dalam menstimulasi dan mengukur aktivasi inovasi. Indeks ini juga menunjukkan semakin inovatif suatu negara maka semakin maju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan inovasi dan kreativitas pemerintahan dimulai dari individu, kelompok dan meningkat menjadi inovasi organisasional. Sasarannya agar seluruh pihak dapat mengembangkan keterampilannya untuk mempermudah pekerjaannya (Permadi, 2018). Inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017, Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah. Inovasi di pemerintahan daerah dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi pelayanan publik juga merupakan bentuk dari inovasi di pemerintahan daerah yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian

pelayanan barang/jasa publik, inovasi jenis dan bentuk barang. Selain itu, inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik sebagai cerminan dari reformasi birokrasi tentunya menjadi harapan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Keberadaan birokrasi yang diharapkan diantaranya harus memiliki kinerja yang baik didasarkan pada perwujudan perilaku aparatur birokrasi yang berintegritas, profesional, dinamis dan inovatif. Hal ini diperlukan karena dinamika perubahan lingkungan serta tantangan lainnya menuntut adanya responsibilitas yang tinggi dari Pemerintah. Salah satu isu nasional terkait dengan penyelenggaraan birokrasi adalah masalah akuntabilitas keuangan negara dan daerah, dimana kualitasnya masih perlu banyak pembenahan termasuk dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, harapan ideal dari setiap pemerintah daerah mengharapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi terkait dengan tata kelola pemerintah dengan penyediaan sarana *helpdesk*-Pojok Akuntansi dengan memberikan pembinaan teknis bagi personil terkait penyusunan laporan keuangan SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin. Penilaian inovasinya dilakukan dengan menggunakan *Luder's Contingency Model*. Luder (1992) menjelaskan transisi dari akuntansi pemerintah tradisional menjadi sistem yang lebih informatif dilakukan melalui interaksi sosial, politik dan faktor administrasi yang termasuk dalam model. Model ini melibatkan empat modul, yakni rangsangan (stimulan), variabel struktur sosial,

variabel struktur dari sistim administrasi politik dan hambatan implementasi. Variabel struktur sosial sebagai pengguna informasi akan mengubah ekspektasi dari masyarakat, anggota parlemen dan lainnya terhadap sistem akuntansi sektor pemerintah. Sedangkan variabel struktur dari sistem administrasi politik akan mengubah sikap dari politisi, manajer dan akuntan sebagai yang menghasilkan informasi. Stimulan yang mempengaruhi dua variabel diatas, yaitu situasi masalah keuangan, skandal keuangan, pasar modal, peraturan standar eksternal dan minat profesi. Hambatan dalam mengimplementasikan model Luder ini adalah karakteristik organisasi, sistem hukum, kualifikasi dari akuntan dan ukuran yurisdiksi.

Penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Kristiawati (2015) dengan menggunakan *Luder;s Contingency Model* menemukan bahwa stimuli dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kalimantan Barat adalah krisis ekonomi, adanya gerakan pro-demokrasi dan tekanan dari lembaga keuangan internasional yang merangsang pemerintah untuk melakukan reformasi akuntansi sektor publik. Reformasi sistem akuntansi sektor publik akan sangat di pengaruhi oleh perekrutan staf khususnya staf akuntansi serta adanya pemberian pelatihan (*training*) mengenai sistem akuntansi akrual. Dimana rekrutmen staf akan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi sikap dasar staf dalam kesiapannya untuk menerima perubahan dan lebih lanjut melakukan pengembangan tentang sistem akuntansi akrual. Ada beberapa hal yang di pandang dapat menjadi hambatan dalam penerapan akuntansi akrual pada pemerintahan daerah Kalimantan Barat yang diantaranya

adalah komitmen, staf dengan kualifikasi yang diperlukan serta perangkat pendukung.

1.2. Rumusan Masalah

Upaya dalam mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah untuk mendapatkan hasil audit dari BPK berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan kepada staf keuangan. Namun pelatihan yang dilakukan memerlukan biaya yang banyak dan jangka waktu yang panjang sehingga pemerintah daerah Kabupaten Merangin melalui BPKAD melakukan inovasi dengan nama inovasi “Pojok Akuntansi”. Dengan menilai dari *Luder’s contingency model* tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah stimulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin membuat inovasi akuntansi pemerintahan “Pojok Akuntansi”?
2. Apakah kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Merangin selama proses membuat inovasi akuntansi pemerintahan “Pojok Akuntansi”?
3. Apakah harapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin terhadap inovasi akuntansi pemerintahan “Pojok Akuntansi”?
4. Siapakah user yang diharapkan memperoleh manfaat dari pembuatan inovasi akuntansi pemerintahan “Pojok Akuntansi”?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti proses pembuatan platform “Pojok Akuntansi” yang dinilai dari *Luder’s contingency model*. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui stimulan dari Pemerintah Kabupaten Merangin membuat platform “Pojoy Akuntansi”.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Merangin selama proses membuat platform “Pojoy Akuntansi”.
3. Mengetahui harapan dibuatnya platform “Pojoy Akuntansi” oleh Kabupaten Merangin.
4. Mengetahui user yang mendapatkan manfaat dari platform “Pojoy Akuntansi”.

1.4. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di sektor publik khususnya inovasi akuntansi pemerintah dengan *Luder's Contingency Model*.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta pengetahuan tentang stimulan, kendala dan manfaat dari inovasi akuntansi pemerintah sehingga pemerintah daerah lainnya terpicu untuk membuat inovasi juga.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Bab I adalah pendahuluan, yang berisi tentang gambaran singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan

sistematika penulisan. Bab II adalah landasan teori, yang berisi tentang landasan teori dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab III adalah metodologi penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan dan tipe penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis data, informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang berisikan pokok dari penelitian yang mencakup deskripsi objek penelitian dan analisis data, serta pembahasan mengenai inovasi akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Merangin dengan menggunakan *Luder's Contingency Model*. Bab V adalah penutup, yang memuat kesimpulan dari penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan penelitian mendatang.

